

SEJARAH BPPA SUKAMANDI

Sejarah Pembentukan dan Kedudukan Kelembagaan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BDA) didirikan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2003 tanggal 20 Agustus 2003. Saat itu lembaga ini masih bernama Balai Diklat Aparatur Sukamandi dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengembangan Aparatur (Pusbangtur), Departemen Kelautan dan Perikanan. Sarana prasarana lembaga seluas 3.5 Ha yang sebelumnya digunakan oleh Loka Riset dan Pemuliaan Budidaya Air Tawar, Badan Riset Kelautan dan Perikanan, sepenuhnya mulai digunakan oleh BDA setelah penandatanganan berita acara serah terima sarana dan prasarana dari Badan Riset Kelautan Perikanan dan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Aparatur, pada tanggal 20 Februari 2004.

Pendirian Balai Diklat Aparatur Sukamandi didorong oleh kebutuhan Departemen Kelautan dan Perikanan akan aparatur yang kompeten dan profesional baik dalam hal manajerial maupun teknis. Terlebih kepada aparatur yang menduduki jabatan pimpinan dalam bidang manajemen, serta aparatur pejabat fungsional dalam meningkatkan ketrampilan teknis yang akan mendukung kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Pemenuhan kompetensi manajerial bagi pimpinan lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan selanjutnya dituangkan dalam bentuk Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV yang diselenggarakan oleh BDA. Sedangkan pemenuhan kompetensi teknis bagi pejabat fungsional diperoleh melalui penyelenggaraan diklat dasar maupun teknis. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan aparatur yang handal, BDA mengembangkan pelayanan diklat tidak hanya kepada aparatur lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi juga kepada aparatur instansi lain seperti aparatur Pemerintah Daerah maupun aparatur dari Kementerian atau Lembaga lain.

Pada tahun 2010 terjadi perubahan organisasi dan nomenklatur Kementerian yang semula Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi BDA dan tindak lanjut perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan maka ditetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Aparatur. Balai Diklat Aparatur sebagai lembaga setingkat eselon III bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kemudian pada tahun 2017 terjadi kembali perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sehingga terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Aparatur. Berdasarkan peraturan tersebut BDA bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan Perikanan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2020 terjadi penataan kembali susunan organisasi dan tata kerja sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi sehingga terbit Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/PERMEN-KP/2020. Berdasarkan aturan tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) berkedudukan di Sukamandi, Subang, Jawa Barat, serta bertanggung jawab langsung kepada kepala badan yang menangani pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Struktur internal BPPA saat ini dipangkas dan hanya terdiri atas Subbagian Umum serta Kelompok Jabatan Fungsional. Posisi manajerial struktural dibatasi hanya untuk dua jabatan, yaitu Kepala Balai sebagai Jabatan Administrator (Eselon III.a) dan Kepala Subbagian Umum sebagai Jabatan Pengawas (Eselon IV.a). Sementara itu, tugas pelayanan teknis dan manajerial di lapangan sepenuhnya dialihkan kepada Kelompok Jabatan Fungsional yang dikoordinasikan oleh Koordinator Pelaksana Fungsional.

Sejak beroperasi pada tahun 2004, BPPA telah mengalami pergantian pimpinan sebanyak enam kali. Estafet kepemimpinan diawali oleh Untung Prasetyono (2004–2008), dilanjutkan oleh Pola S.T. Panjaitan (2008–2010), diikuti oleh Praatma Prihadi (2010–2011) di tengah perubahan nomenklatur berdasarkan PermenKP 48 Tahun 2011, yang selanjutnya dipimpin oleh Hasrat AS (2011–2017). Memasuki periode transisi regulasi baru PermenKP 25 Tahun 2017, lembaga ini dipimpin oleh I Wayan Suarya (2017–2018). Sejak tahun 2018 hingga sekarang, BPPA dipimpin oleh R. Hernan Mahardhika. Di bawah payung hukum PermenKP Nomor 86 Tahun 2020, BPPA senantiasa memperluas pelayanan demi melahirkan aparatur yang handal dan profesional. Sejak awal berdirinya, BPPA telah mencetak lebih dari 55.000 aparatur terlatih melalui berbagai program pengembangan kompetensi, mulai dari Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan Dasar CPNS, Pelatihan Dasar Jabatan Fungsional binaan KKP, Pelatihan Teknis bidang Kelautan dan Perikanan, Pelatihan Manajerial, Sosiokultural, serta pelaksanaan uji kompetensi.

Transformasi Digital melalui eMilea

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan BPPA Sukamandi adalah pengembangan eMilea atau Electronic Millennial Learning, yaitu platform Learning Management System yang digunakan untuk mendukung pembelajaran digital bagi aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Platform eMilea mulai digunakan dalam penyelenggaraan pelatihan pada Februari 2020 dan diresmikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada 18 Mei 2020. Kehadiran eMilea memungkinkan pelatihan diselenggarakan melalui metode pembelajaran daring, pembelajaran campuran atau blended learning, pembelajaran penuh secara daring, serta pembelajaran mandiri.

Pengembangan eMilea sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Melalui eMilea, keterbatasan jarak, waktu, dan lokasi peserta dapat dikurangi. Materi pembelajaran

dapat diakses secara lebih fleksibel, proses pembelajaran dapat terdokumentasi, dan jangkauan layanan pengembangan kompetensi dapat diperluas kepada peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Dengan demikian, eMilea menjadi bagian penting dari transformasi BPPA Sukamandi dari lembaga pelatihan konvensional menuju ekosistem pembelajaran digital.

Perkembangan dan Capaian

Selama lebih dari dua dekade, BPPA Sukamandi telah berkembang menjadi salah satu pusat pengembangan kompetensi aparatur di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perkembangan tersebut ditandai dengan beberapa capaian utama, yaitu:

1. menyelenggarakan pelatihan teknis, fungsional, manajerial, sosial kultural, pelatihan dasar, dan pelatihan kepemimpinan bagi aparatur secara berkelanjutan;
2. mengembangkan materi dan metodologi pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan;
3. menjadi pelopor penyelenggaraan pembelajaran digital melalui platform eMilea;
4. mengembangkan metode pembelajaran klasikal, blended learning, full online learning, pembelajaran mandiri, dan pembelajaran berbasis teknologi;
5. memperluas akses pelatihan bagi ASN KKP dan pemangku kepentingan di berbagai wilayah Indonesia;
6. mendukung pemenuhan kewajiban pengembangan kompetensi ASN secara berkelanjutan;
7. mendukung penerapan sistem pembelajaran terintegrasi berdasarkan pendekatan ASN Corporate University;
8. meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelatihan melalui pemanfaatan teknologi informasi; serta
9. mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pembentukan aparatur yang profesional, kompeten, adaptif, dan berintegritas.

Penerapan prinsip ASN Corporate University memperoleh penguatan melalui Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi atau Corporate University. Pendekatan tersebut menempatkan pembelajaran sebagai bagian dari strategi pencapaian tujuan organisasi, bukan sekadar kegiatan pelatihan yang bersifat administratif. Dengan pendekatan tersebut, program pembelajaran BPPA Sukamandi diarahkan agar memiliki hubungan yang jelas dengan kebutuhan kompetensi pegawai, permasalahan organisasi, peningkatan kinerja, serta pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan.

STRUKTUR KELEMBAGAAN



VISI MISI BPPA KP

Visi

Visi Mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025-2029, “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi

Misi Mendukung Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI 2025-2029

Tugas dan Fungsi

Tujuan

- Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (BPPA) KKP, meliputi:
 1. Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik;A
 2. Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip

- Prinsip pelayanan informasi publik meliputi:
 1. Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan efisien;
 2. Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu;
 3. Penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.